Relevansi Postur Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Klaim Sepihak Tiongkok tentang Ten Dash Line



Kolonel Laut (P) Didi Efendi, S.Sos., M.Tr.Hanla., M.M
Direktur Pengkajian Maritim Kawasan Pusjianmar Seskoal

1. Umum

Sebagai anggota utama ASEAN, posisi politik luar negeri Indonesia sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan.[1] Hal ini dikarenakan pengaruhnya terhadap negara-negara ASEAN lainnya dalam hal jumlah penduduk, ekonomi, dan keamanan. Selama beberapa tahun terakhir, beberapa negara ASEAN telah berhasil mengatasi konflik dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, Indonesia selalu menekankan kepada negara-negara ASEAN untuk mengatasinya melalui jalur diplomatik. Saat ini, ketegangan di Laut Cina Selatan terus meningkat, terutama bagi negara-negara penggugat seperti Malaysia dan Filipina.[2] Hal ini dapat meningkatkan ketegangan menjadi konflik; oleh karena itu, pihak yang netral harus meredakan ketegangan yang timbul tanpa memihak.

Sejak kemerdekaannya, Indonesia secara konsisten memilih politik luar negeri Non Blok karena hal tersebut tercantum dalam konstitusi Indonesia. Sebagai pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) dan pemimpin ASEAN, Indonesia selalu menahan diri untuk tidak berpihak dalam sengketa geopolitik besar.[3] Hal ini akan memberikan fleksibilitas bagi politik luar negeri Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan agresivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan. Namun, perluasan klaim sepihak Tiongkok di Laut Cina Selatan membuat Indonesia sulit untuk mempertahankan netralitas.[4] Sebab, Tiongkok masih ngotot mengklaim dan kemampuan militernya lebih unggul dari Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia lebih memilih untuk bersikap netral. Indonesia memilih jalur diplomatik daripada bergabung dengan aliansi Barat karena hal tersebut membuat Indonesia lebih fleksibel dalam mengarungi perubahan geopolitik dunia dan tidak memperuncing konflik.

[1] Asia News Network, "China dan Indonesia Memperkuat Hubungan Strategis di Tengah Ketegangan Laut Cina Selatan tanggal 13 Agustus 2024.
[2] "Sengketa Wilayah di Laut Cina Selatan | Penjelajahan Konflik Global," Di akses 9 Maret 2025, https://www.cfr.org/global-konflik-penjelajahan/konflik/teritorial-sengketa-laut-cina-selatan.
[3] I. Gede Wahyu Wicaksana and Probo Darono Yakti, "Indonesia's New Partial Multialignment Strategy: A Conceptual and Empirical Analysis," *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, February 10, 2025, 1–18, https://doi.org/10.1017/trn.2025.1.
[4] "Pemetaan Ulang Tata Kelola laut Cina Selatan: Respon Negara-Negara ASEAN Tentang '10-Dash Line'oleh Cina| Center for Indo-Pacific Affairs," 9 Maret 2025, https://manoa.hawaii.edu/indopacificaffairs/article/student-research-remapping-governance-in-the-south-china-sea-chinas-new-10-dash-line-and-responses-from-asean-states/.

2. Latar Belakang

Kebijakan Luar Negeri Non Blok Indonesia. Komitmen historis Indonesia terhadap non-blok dimulai dengan Konferensi Asia Afrika Pertama pada tahun 1955, sebuah peristiwa penting dalam dekolonisasi.[5] Konferensi tersebut diadakan di Bandung, Indonesia; 29 peserta yang mewakili negara-negara Asia dan Afrika menghadiri konferensi tersebut, membahas tentang pengembangan kolaborasi ekonomi dan budaya sambil menentang kolonialisme dan neo-kolonialisme yang diabadikan oleh negara-negara Barat.[6] Sejak saat itu, kebijakan luar negeri Indonesia tetap netral dan aktif, yang mengharuskan keterlibatan Indonesia dalam banyak organisasi di seluruh dunia dan membangun kebijakan luar negeri yang independen dan bebas dari pengaruh eksternal.

Indonesia secara konsisten memperjuangkan prinsip-prinsip ini melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan platform multilateral lainnya. Prinsip ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang mencintai perdamaian dan keamanan.[7] Komitmen Indonesia yang teguh terhadap cita-cita yang ditetapkan dalam Konferensi Asia Pasifik di Bandung menunjukkan kapasitasnya untuk menegakkan otonomi strategis sambil membina perdamaian dan kolaborasi internasional.

Sengketa Laut Cina Selatan dan Sikap Tegas Cina. Meskipun Indonesia bukan negara penggugat, ketegangan atas sengketa Laut Cina Selatan selalu menjadi masalah bagi Indonesia. Pada tahun 2016, sebuah kapal Coast Guard Cina mengawal kapal nelayan Cina untuk menangkap ikan di perairan Natuna, dan TNI Angkatan Laut Indonesia melaksanakan pencegahan.[8] Namun, Cina menanggapi dengan mengirim lebih banyak kapal Coast Guard ke Laut Natuna dalam beberapa bulan. Akibatnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI Angkatan Udara untuk segera bergerak ke wilayah Kepulauan Natuna.[9] Itu memberi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan menoleransi tindakan provokatif di wilayah kedaulatan.

Agresivitas Tiongkok dalam sengketa Laut Cina Selatan (LCS) bermula pada tahun 1974 akibat meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Vietnam di sekitar Kepulauan Paracel.[10] Sejak saat itu, Indonesia terlibat dalam jalur diplomatik untuk memprotes tindakan Tiongkok. Berdasarkan berbagai fakta sejarah, prinsip inti Indonesia dalam politik luar negeri terhadap Laut Cina Selatan adalah Indonesia tidak melakukan intervensi dalam konflik Laut Cina Selatan. Berdasarkan bukti, Tiongkok tidak ambil pusing ketika Indonesia dan Malaysia menyepakati

[5] "Konferensi asia Afrika [1955] | Model UN, 14 Maret 2025, https://clubs.d-e.org/demun/committees/bandung-conference-1955/.
[6] "The South Centre | Revisiting the 1955 Bandung Asian-African Conference and Its Legacy," accessed March 9, 2025, https://www.southcentre.int/question/revisiting-the-1955-bandung-asian-african-conference-and-its-legacy/.
[7] "Washington," accessed March 9, 2025, https://kemlu.go.id/washington/kebijakan/kebijakan-luar-negeri-ri.
[8] Lyle J. Morris, "Ketegangan Indonesia-China di Laut Natuna: Buktikan Efektifitas Angkatan Laut Dibandingkan Coast Guard 5 Juli 5 2016, https://www.rand.org/pubs/commentary/2016/07/indonesia-china-tensions-in-the-natuna-sea-evidence.html.
[9] "Indonesia Parades Air-Force Arsenal Over South China Sea - WSJ," accessed March 9, 2025, https://www.wsj.com/articles/indonesia-parades-air-force-arsenal-over-south-china-sea-1475751941.
[10] "The 1974 Paracels Sea Battle: A Campaign Appraisal | Andrew S. Erickson," accessed March 9, 2025, https://www.andrewerickson.com/2016/03/the-1974-paracels-sea-battle-a-campaign-appraisal/.

perjanjian landas kontinen di Laut Cina Selatan pada tahun 1969, yang meliputi wilayah yang termasuk dalam *Ten Dash Line*.[11] Perjanjian tersebut kemudian didaftarkan ke PBB dan diumumkan kepada publik di Tiongkok tanpa ada yang keberatan. Namun, Tiongkok saat ini bersikap masa bodoh dengan mengirimkan pasukan penjaga pantai Tiongkok dan kerap kali mengancam kapal-kapal nelayan lokal.

Indikasi ketegasan Tiongkok bermula ketika mereka mendemonstrasikan reklamasi lahan yang luas untuk menciptakan pulau buatan, yang diikuti oleh militerisasi pulau-pulau tersebut. Beijing tidak pernah mengumumkan pulau tersebut sebagai pangkalan militer, tetapi mereka membangun infrastruktur militer di pulau-pulau tersebut, yang terdiri dari sistem rudal, landasan udara, dan instalasi radar.[12] Membangun infrastruktur militer di pulau buatan merupakan cara untuk memperkuat kehadiran strategis terhadap ancaman regional dan internasional. Upaya ini melanggar keputusan Pengadilan Arbitrase Tetap tahun 2016, yang membatalkan pernyataan "sembilan garis putus-putus" Tiongkok dan menegakkan hak kedaulatan Filipina atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya.[13] Meskipun demikian, Tiongkok belum mengakui putusan tersebut dan terus mengerahkan patroli penjaga pantai, melakukan aktivitas milisi maritim, dan memberikan tekanan diplomatik kepada negara-negara ASEAN.[14] Tindakan agresif ini meningkatkan ketegangan dan memperburuk situasi geopolitik di Asia Tenggara.

3. Analisis

Kekuatan Non-Blok Indonesia. Keanggotaan Indonesia dan dedikasinya pada Gerakan Non-Blok (GNB) telah memberinya banyak manfaat strategis, yaitu memungkinkannya menangani berbagai isu global yang rumit sekaligus melindungi kepentingan nasionalnya.[15] Akibatnya, Indonesia tetap berpegang pada strategi otonominya dan tidak ikut campur dalam pertikaian antara dua kekuatan besar dari Timur dan Barat. Indonesia juga mempertahankan kebebasannya dalam membuat keputusan tentang politik luar negeri, dan bersikap netral berarti Indonesia dapat menjalin hubungan baik dengan Timur dan Barat. Pada saat yang sama, Indonesia dapat membangun hubungan ekonomi dan militer tanpa terlihat memihak satu pihak terhadap pihak lainnya.[16] Gerakan Non-Blok juga membuat Indonesia terlibat aktif dalam berbagai organisasi dan kerja sama internasional, terutama dalam lingkungan global seperti PBB dan ASEAN.

Salah satu keuntungan menjadi negara Non Blok adalah tidak adanya kecurigaan terhadap upaya negosiasi. Pada tahun 1990, seorang diplomat terkemuka

[11] "UNCLOS | PCA-CPA," accessed March 9, 2025, https://pca-cpa.org/services/arbitration-services/unclos/.
[12] "China Tracker," Asia Maritime Transparency Initiative, accessed March 21, 2025, https://amti.csis.org/island-tracker/china/.
[13] "After the South China Sea Ruling – The Diplomat," accessed March 21, 2025, https://thediplomat.com/2016/06/after-the-south-china-sea-ruling/.
[14] "Perseteruan penerapan Aturan Internasional di Laut Cina Selatan | Crisis Group," 9 November 2021, https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/315-competing-visions-international-order-south-china-sea.
[15] Rizal Sukma, "EvolusiKebijakan Luar Negeri: Cara Pandang Indonesia," *Asian Survey* 35, no. 3 (1995): 304–15, https://doi.org/10.2307/2645547.
[16] Ibid. Sukma.

Indonesia, Bapak Hashim Djalal, memprakarsai serangkaian lokakarya tentang Pengelolaan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan yang dihadiri oleh semua negara penggugat.[17] Konferensi tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi semua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara diplomatis. Setelah beberapa pertemuan dan upaya sebelumnya untuk memfasilitasi dialog mengenai sengketa Laut Cina Selatan, pada tahun 2023, Indonesia dan Tiongkok membentuk Dialog Bersama Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Cina-Indonesia.[18] Chen Xiangmao, Direktur Pusat Penelitian Angkatan Laut Dunia di Institut Nasional untuk Studi Laut Cina Selatan, mengatakan bahwa dialog tersebut penting bagi hubungan Tiongkok-ASEAN dan bahwa diskusi tersebut akan dapat meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan.[19] Sikap Indonesia ini menunjukkan bahwa menjadi negara Non-**Blok dapat memberikan keuntungan dalam proses negosiasi.**

Menegakkan Hukum Internasional & Kepemimpinan Regional. Manfaat negara Non Blok adalah Indonesia dapat menegakkan Hukum Internasional. Indonesia menegaskan dalam setiap pernyataan resminya bahwa Indonesia hanya akan mengakui apa yang tercantum dalam UNCLOS dan tidak akan pernah mengakui keabsahan klaim apa pun yang didasarkan pada peta sembilan garis putus-putus milik Tiongkok. Indonesia juga akan menunjukkan bahwa menurut UNCLOS, Tiongkok tidak dapat menggunakan alasan kapal penangkap ikannya untuk menangkap ikan di wilayah yang tumpang tindih dengan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).[20] Selain itu, sebagai salah satu pemain kunci di ASEAN, Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinan regionalnya. Indonesia selalu menemukan keseimbangan yang optimal antara menjaga persatuan kawasan, memproyeksikan netralitas, dan memajukan ASEAN di era persaingan kekuatan besar.

Pembatasan Non-Alignment Indonesia. Kebijakan luar negeri ini memberikan kebebasan strategis bagi negara tetapi memiliki beberapa pembatasan yang signifikan. Indonesia tidak dapat membuat kemitraan strategis yang mendalam dan mendapatkan info intelijen serta akses ke teknologi canggih, dan juga lemah dalam daya tawar karena kurangnya dukungan dari negara-negara Blok.[21] Pembatasan ini dapat menempatkan Indonesia dalam posisi yang lemah terhadap Tiongkok. Terkait diplomasi, Pemerintah Indonesia harus bernavigasi dengan cerdas untuk terlibat dalam hubungan internasional karena netralitas dapat mengurangi kekuatan Indonesia di forum internasional, di mana negara-negara dalam satu blok akan

[17] Damos Agusman, "Perairan Natuna: Penjelasan Flashpoint Antara Indonesia dan Cina," *Indonesian Journal of International Law* 20, no. 4 (10 agustus 2023), https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol20/iss4/4.

[18] Asia News Network, "China dan Indonesia Memperkuat Hubungan Strategis di Tengah Ketegangan Laut Cina Selatan: First Senior Officials Meeting," *The Asia Live* (blog), August 13, 2024, https://theasialive.com/china-and-indonesia-strengthen-strategic-ties-amid-south-china-sea-tensions-first-senior-officials-meeting/2024/08/13/.

[19] Network, "Cina dan Indonesia Memperkuat Hubungan Strategis di Tengah Ketegangan Laut Cina Selatan 13 Agustus 2024.

[20] Menagapa Indonesia Berperan Dalam Mempertahankan UNCLOS," *Centre for International Law* (blog) 9 Maret 2025, https://cil.nus.edu.sg/publication/why-indonesia-has-stake-in-fight-to-defend-unclos/.

[21] Raditya Putra Yudha, "Kebijakan Luar Negeri Non Blok Indonesia: Kendala atau Peluang," Diplomasi Modern 29Juni 2024, https://moderndiplomacy.eu/2024/06/29/indonesias-non-aligned-foreign-policy-limitation-or-opportunity/.

menggunakan kekuatan kolektif untuk mendapatkan kepentingan mereka. Selain itu, Indonesia harus menerjemahkan kepentingannya tanpa dukungan jaringan aliansi. Tidak menjadi anggota aliansi keamanan seperti AUKUS atau Quad juga membuatnya kurang mampu membentuk kerangka kerja keamanan regional. Menjadi non-aliansi membuatnya terbuka terhadap tekanan di luar kawasan tanpa komitmen pertahanan yang kuat. Indonesia mudah dipaksa karena tidak memiliki jaminan keamanan berbasis perjanjian, dan upayanya untuk memodernisasi militernya melambat karena aksesnya yang terbatas ke teknologi pertahanan canggih. Selain itu, ketika terjadi krisis, Indonesia mungkin tidak dapat secara efektif melindungi kepentingannya karena tidak dapat secara langsung meminta bantuan negara-negara besar tanpa mengambil risiko diplomatik.

4. Pendekatan alternatif.

Agresivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan menantang kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak berpihak. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia harus meningkatkan hubungannya dengan negara-negara tetangga seperti ASEAN dan negara-negara mitra untuk mengelola interaksi dengan Tiongkok. Indonesia dapat mengambil peran yang lebih proaktif dengan memfasilitasi konsensus di antara negara-negara anggota ASEAN atas sengketa maritim dengan Tiongkok. Beberapa bulan sebelumnya, Presiden Prabowo mengunjungi Tiongkok, di mana Indonesia mendukung deklarasi bersama, yang mencakup komitmen Tiongkok untuk melanjutkan diskusi tentang *Code of Conduct* di Laut Cina Selatan.[22] Solusi kolektif regional ini dapat memengaruhi penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Selain itu, memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara seperti AS, Jepang, Australia, dan India dapat membantu keamanan maritim Indonesia. Namun, koalisi perlu dibentuk untuk mendukung kenetralan Indonesia dan mendorong mitra untuk lebih banyak bekerja sama sehingga tidak terlihat seperti aliansi formal dan Indonesia tetap netral.

5. Rekomendasi Kebijakan.

Berdasarkan latar belakang, analisis, dan penelusuran konteks alternatif, ada beberapa rekomendasi untuk menjawab relevansi postur politik luar negeri Indonesia saat ini:

a. Melaksanakan Diplomasi Proaktif: Indonesia harus terlibat aktif dan meningkatkan inisiatif diplomatik untuk meredakan ketegangan dan mendorong penyelesaian secara damai.
b. Memperkuat Persatuan ASEAN: Di tengah pesimisme saat ini terhadap ASEAN, hal penting bagi Indonesia adalah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk bersatu dan bekerja sama.
c. Kemitraan Strategis Selektif: Meningkatkan kerja sama dengan mitra strategis utama dalam keamanan maritim sambil mempertahankan

[22] "Pemetaan Ulang Di laut Cina Selatan : '10-Dash Line'dan Sikap Negara Negara ASEAN | Center for Indo-Pacific Affairs," 14 Maret 2025, https://manoa.hawaii.edu/indopacificaffairs/article/student-research-remapping-governance-in-the-south-china-sea-chinas-new-10-dash-line-and-responses-from-asean-states/.

komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip Non-Blok.

d. Mengembangkan kemampuan maritim Non-Abu-Abu: Pemerintah harus meningkatkan kemampuan *Coast Guard* untuk melindungi kedaulatannya secara efektif.

6. Kesimpulan

Situasi Laut Cina Selatan saat ini menimbulkan tantangan yang kompleks dan tidak terbatas bagi pendekatan Indonesia terhadap hubungan luar negeri. Sikap independen Indonesia secara konsisten telah memberikan manfaat bagi negara ini sepanjang sejarah. Meskipun demikian, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan akibat penegasan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Menghadapi tindakan koersif Tiongkok memerlukan kerja sama regional yang kuat dan dukungan dari mitra eksternal, seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Meskipun demikian, strategi ini dapat mengakibatkan hasil yang merugikan di kawasan tersebut, sehingga memerlukan pertimbangan yang cermat dalam membangun aliansi untuk mengatasi sengketa Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, Indonesia harus mempertahankan sikap netralnya di kawasan tersebut untuk menjaga kelincahan yang dibutuhkan dalam menavigasi persaingan kekuatan global yang ketat sambil memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat dan sekutunya serta memperkuat koneksi dalam ASEAN untuk mengatasi pengaruh Tiongkok di Laut Cina Selatan secara efektif.

Daftar Pustaka

"After the South China Sea Ruling – The Diplomat." Accessed March 21, 2025. https://thediplomat.com/2016/06/after-the-south-china-sea-ruling/.

Agusman, Damos. "Perairan Natuna: Penjelasan Konflik Antara Indonesia dan Cina." *Indonesian Journal of International Law* 20, no. 4 (10 Agustus 2023). https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol20/iss4/4.

Asia Maritime Transparency Initiative. "China Tracker." Accessed March 21, 2025. https://amti.csis.org/island-tracker/china/.

"Bandung Conference [1955] | Model UN." Accessed March 14, 2025. https://clubs.d-e.org/demun/committees/bandung-conference-1955/.

Centre for International Law. "Mengapa Indonesia Berusaha andil Dalam Mempertahankan UNCLOS." 9 Maret 2025. https://cil.nus.edu.sg/publication/why-indonesia-has-stake-in-fight-to-defend-unclos/.

"Persaingan Visi Dalam Menentukan A Internasional di Laut Cina Selatan | Crisis Group," 29 November 2021. https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/315-competing-visions-international-order-south-china-sea.

"Indonesia Parades Air-Force Arsenal Over South China Sea - WSJ." Accessed March 9, 2025. https://www.wsj.com/articles/indonesi

a-parades-air-force-arsenal-over-south-china-sea-1475751941.

Morris, Lyle J. "Indonesia-China Tensions in the Natuna Sea: Evidence of Naval Efficacy Over Coast Guards?," July 5, 2016. https://www.rand.org/pubs/commentary/2016/07/indonesia-china-tensions-in-the-natuna-sea-evidence.html.

Network, Asia News. "Memperkuat hubungan Strategias Cina dan Indonesia di Tengah Ketegangan Cina dan Indonesia: First Senior Officials Meeting." *The Asia Live* (blog), 13 Agustus 2024. https://theasialive.com/china-and-indonesia-strengthen-strategic-ties-amid-south-china-sea-tensions-first-senior-officials-meeting/2024/08/13/.

"Remapping Governance in the South China Sea: China's New '10-Dash Line' and Responses from ASEAN States | Center for Indo-Pacific Affairs." Accessed March 9, 2025. https://manoa.hawaii.edu/indopacificaffairs/article/student-research-remapping-governance-in-the-south-china-sea-chinas-new-10-dash-line-and-responses-from-asean-states/.

Sukma, Rizal. "Evolusi Kebijakan Luar Negeri Indonesia: ditinjau dari pandangan Indonesia." *Asian Survey* 35, no. 3 (1995): 304–15. https://doi.org/10.2307/2645547.

"Territorial Disputes in the South China Sea | Global Conflict Tracker." Accessed March 9, 2025. https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea.

"The 1974 Paracels Sea Battle: A Campaign Appraisal | Andrew S. Erickson." Accessed March 9, 2025. https://www.andrewerickson.com/2016/03/the-1974-paracels-sea-battle-a-campaign-appraisal/.

"The South Centre | Revisiting the 1955 Bandung Asian-African Conference and Its Legacy." Accessed March 9, 2025. https://www.southcentre.int/question/revisiting-the-1955-bandung-asian-african-conference-and-its-legacy/.

"UNCLOS | PCA-CPA." Accessed March 9, 2025. https://pca-cpa.org/services/arbitration-services/unclos/.

Wicaksana, I. Gede Wahyu, and Probo Darono Yakti. "Indonesia's New Partial Multialignment Strategy: A Conceptual and Empirical Analysis." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, February 10, 2025, 1–18. https://doi.org/10.1017/trn.2025.1.

Yudha, Raditya Putra. "Kebijakan Politik Luar negeri Indonesia Non Blok: Kendala Atau Peluang." Diplomasi Modern, 29 Juni 2024. https://moderndiplomacy.eu/2024/06/29/indonesias-non-aligned-foreign-policy-limitation-or-opportunity/.